

Geopolitik Digital dalam Sistem Pembayaran QRIS: Analisis Resistensi Indonesia terhadap Hegemoni Keuangan Global

Imama Zuchroh¹, Setiyawan²

^{1,2}STIE Malangkucecwara, Malang, Indonesia

Email korespondensi: zuchroh1974@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the dynamics of digital geopolitics in the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) payment system as a form of Indonesia's resistance against the United States' global financial hegemony. Using descriptive qualitative research methods with a library research approach, this study examines the United States' criticism of QRIS in the National Trade Estimate 2025 report and Indonesia's response. The research findings indicate that QRIS represents Indonesia's digital sovereignty strategy that challenges the dominance of US-based global payment systems. US criticism of QRIS, which is considered to limit foreign companies' access, actually strengthens Indonesia's digital nationalism narrative. QRIS implementation has reached 56.3 million users with 38.1 million MSMEs in the first quarter of 2025, demonstrating the success of digital financial inclusion. The expansion of QRIS to Japan, China, and other Asian countries starting in August 2025 proves that Indonesia has successfully built an alternative payment system that does not depend on Western financial infrastructure. Indonesia's resistance to US pressure through QRIS marks a transformation from object to subject in the global financial architecture, while strengthening Indonesia's position as a regional digital power.

Keywords: QRIS, digital geopolitics, financial hegemony, digital sovereignty, resistance, United States

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika geopolitik digital dalam sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai bentuk resistensi Indonesia terhadap hegemoni keuangan global Amerika Serikat. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *library research*, studi ini mengkaji kritik Amerika Serikat terhadap QRIS dalam laporan National Trade Estimate 2025 dan respons Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS merepresentasikan strategi kedaulatan digital Indonesia yang menantang dominasi sistem pembayaran global berbasis Amerika Serikat. Kritik AS terhadap QRIS yang dianggap membatasi akses perusahaan asing justru memperkuat narasi nasionalisme digital Indonesia. Implementasi QRIS telah mencapai 56,3 juta pengguna dengan 38,1 juta UMKM pada triwulan I 2025, menunjukkan keberhasilan inklusi keuangan digital. Ekspansi QRIS ke Jepang, China, dan negara Asia lainnya mulai Agustus 2025 membuktikan bahwa Indonesia berhasil membangun alternatif sistem pembayaran yang tidak bergantung pada infrastruktur keuangan Barat. Resistensi Indonesia terhadap tekanan AS melalui QRIS menandai transformasi dari objek menjadi subjek dalam arsitektur keuangan global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan digital regional.

Kata kunci: QRIS, geopolitik digital, hegemoni keuangan, kedaulatan digital, resistensi, Amerika Serikat

PENDAHULUAN

"Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, khawatir selama proses pembuatan kebijakan kode QR BI, para pemangku kepentingan internasional tidak diberi tahu tentang perubahan yang mungkin terjadi atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka mengenai sistem tersebut," demikian kritik keras Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang tertuang dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis United States Trade Representative (USTR) pada akhir Maret 2025.

Kritik tersebut menandai babak baru dalam dinamika geopolitik digital antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam domain sistem pembayaran digital. QRIS, yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 sebagai standar nasional pembayaran berbasis QR code, kini menjadi arena kontestasi kepentingan geopolitik antara kedaulatan digital Indonesia dan hegemoni keuangan global yang selama ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti Visa dan Mastercard.

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari konteks transformasi global menuju ekonomi digital yang semakin intensif. Sistem pembayaran digital telah menjadi infrastruktur strategis yang tidak hanya berimplikasi ekonomis, tetapi juga politis dan keamanan nasional. Kontrol atas sistem pembayaran digital memberikan kekuatan untuk mengawasi, mengatur, dan bahkan membatasi transaksi keuangan, yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai instrumen diplomasi ekonomi atau bahkan sanksi.

Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, merepresentasikan pasar yang sangat strategis bagi sistem pembayaran global. Keputusan Indonesia untuk mengembangkan QRIS sebagai standar nasional yang wajib digunakan oleh seluruh *merchant* di Indonesia sejak 1 Januari 2020, secara efektif menantang dominasi sistem pembayaran internasional yang selama ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat.

Tabel 1. Periodisasi Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Indonesia

Periode	Tahun	Milestone Utama	Karakteristik
Era Pra-Digital	2010-2015	Dominasi pembayaran tunai dan kartu kredit internasional	Ketergantungan pada sistem pembayaran asing
Inisiasi Digital	2016-2018	Munculnya <i>e-wallet</i> lokal (GoPay, OVO, DANA)	Fragmentasi sistem pembayaran digital
Konsolidasi Nasional	2019-2021	Peluncuran QRIS (17 Agustus 2019), Implementasi wajib (1 Januari 2020)	Standardisasi dan integrasi sistem pembayaran
Ekspansi Regional	2022-2024	QRIS Cross-border dengan Thailand, Malaysia, Singapura	Internasionalisasi sistem pembayaran domestik

Periode	Tahun	Milestone Utama	Karakteristik
Konfrontasi Global	2025-sekarang	Kritik AS dalam NTE 2025, Ekspansi ke Jepang dan China	Geopolitisasi sistem pembayaran digital

Periodesasi ini menunjukkan evolusi Indonesia dari negara yang sepenuhnya bergantung pada sistem pembayaran asing menuju negara yang membangun kedaulatan digital melalui sistem pembayaran nasional. Transformasi ini tidak hanya berdimensi teknologi dan ekonomis, tetapi juga politis, karena mengubah struktur kekuasaan dalam ekosistem pembayaran digital global.

Kontestasi ini semakin menguat ketika Amerika Serikat, melalui laporan USTR 2025, secara eksplisit mengkritik kebijakan Indonesia terkait QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Kritik tersebut tidak hanya menyoroti aspek teknis atau regulatoris, tetapi juga mengungkapkan kekhawatiran fundamental Amerika Serikat terhadap berkurangnya pengaruh perusahaan-perusahaan Amerika dalam sektor pembayaran digital Indonesia.

Respons publik Indonesia terhadap kritik Amerika Serikat sangat menarik untuk dianalisis. Alih-alih menimbulkan keresahan, kritik tersebut justru memicu gelombang dukungan masif dari masyarakat Indonesia di media sosial dengan tagar #QRIS yang menjadi *trending topic*. Fenomena ini menunjukkan bahwa QRIS tidak hanya dipersepsikan sebagai infrastruktur teknologi, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan dan kebanggaan nasional.

Dinamika geopolitik digital ini terjadi dalam konteks persaingan strategis yang lebih luas antara Amerika Serikat dan China dalam teknologi digital, di mana Indonesia berusaha memosisikan diri secara strategis tanpa sepenuhnya terjebak dalam dikotomi tersebut. QRIS dapat dipahami sebagai upaya Indonesia untuk membangun "jalan ketiga" dalam geopolitik digital global, yaitu membangun kapasitas teknologi domestik yang tidak sepenuhnya bergantung pada salah satu kekuatan besar.

Penelitian ini menjadi penting karena menganalisis bagaimana negara berkembang seperti Indonesia dapat membangun resistensi terhadap hegemoni keuangan global melalui inovasi teknologi digital. Studi ini juga berkontribusi pada pemahaman tentang geopolitik digital dalam era multipolar, di mana kekuatan teknologi tidak lagi dimonopoli oleh negara-negara maju tetapi juga dapat dikembangkan oleh negara-negara berkembang dengan strategi yang tepat.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep geopolitik digital telah menjadi fokus akademis yang semakin penting dalam studi hubungan internasional kontemporer. Chacko (2023) mendefinisikan geopolitik digital sebagai kontestasi kekuasaan dalam ruang siber yang melibatkan negara, korporasi multinasional, dan aktor non-negara lainnya dalam memperebutkan kontrol atas infrastruktur digital, data, dan teknologi informasi. Dalam konteks sistem pembayaran, geopolitik digital manifestasinya terlihat dalam

upaya negara-negara untuk membangun kedaulatan digital melalui pengembangan infrastruktur pembayaran domestik.

Kedaulatan digital, menurut Pohle dan Thiel (2020), merujuk pada kemampuan negara untuk mengontrol dan mengatur infrastruktur digital di wilayahnya tanpa tergantung pada aktor eksternal. Dalam konteks sistem pembayaran, kedaulatan digital berarti kemampuan negara untuk memproses transaksi keuangan domestik melalui infrastruktur yang dikontrol secara nasional, bukan melalui sistem yang dikuasai oleh perusahaan asing.

Hegemoni keuangan global telah menjadi objek analisis kritis dalam studi ekonomi politik internasional. Strange (2020) mengargumentasikan bahwa kontrol atas sistem pembayaran internasional merupakan salah satu pilar utama hegemoni Amerika Serikat dalam ekonomi global. Dominasi dollar AS dalam perdagangan internasional dan kontrol Amerika Serikat atas sistem pembayaran global seperti SWIFT memberikan Washington kemampuan untuk menerapkan sanksi ekonomi dan mengontrol aliran keuangan global.

Dalam konteks Asia, beberapa negara telah mengembangkan sistem pembayaran digital domestik sebagai alternatif terhadap dominasi sistem pembayaran Barat. Chen dan Wang (2021) menganalisis bagaimana China mengembangkan Alipay dan WeChat Pay sebagai instrumen *soft power* dan alternatif terhadap sistem pembayaran global yang didominasi oleh perusahaan Amerika. India juga mengembangkan Unified Payments Interface (UPI) yang berhasil mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran internasional.

Kajian tentang QRIS dalam konteks akademis masih relatif terbatas, namun beberapa studi telah menganalisis aspek teknis dan ekonomisnya. Pratama dan Sari (2022) menganalisis dampak QRIS terhadap inklusi keuangan di Indonesia dan menemukan bahwa sistem ini berhasil meningkatkan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat *unbanked*. Namun, dimensi geopolitik dari QRIS belum banyak dieksplorasi dalam literatur akademis.

Resistensi terhadap hegemoni teknologi global telah menjadi tema penting dalam studi geopolitik digital. Scholte (2021) mengidentifikasi berbagai strategi yang digunakan negara-negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan teknologi, termasuk pengembangan teknologi domestik, diversifikasi partner teknologi, dan pembangunan kapasitas lokal. Dalam konteks sistem pembayaran, strategi ini dapat diwujudkan melalui pengembangan standar pembayaran nasional yang *interoperable* tetapi tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi asing.

Konsep *soft power* dalam era digital juga relevan untuk memahami dinamika QRIS. Nye (2022) mengargumentasikan bahwa kemampuan teknologi dapat menjadi sumber *soft power* yang memungkinkan negara untuk menarik dan mempengaruhi negara lain tanpa menggunakan paksaan. Ekspansi QRIS ke negara-negara Asia dapat dipahami sebagai proyeksi *soft power* Indonesia dalam domain teknologi pembayaran digital.

Teori dependensi teknologi juga memberikan kerangka analitis yang berguna untuk memahami upaya Indonesia membangun kemandirian dalam sistem pembayaran. Cardoso dan Faletto (2021) mengargumentasikan bahwa

ketergantungan teknologi dapat menjadi bentuk baru kolonialisme yang membatasi autonomi negara berkembang. Dalam konteks ini, QRIS dapat dipahami sebagai upaya Indonesia untuk memutus ketergantungan teknologi dalam sektor pembayaran digital.

Literatur tentang nasionalisme digital juga relevan untuk memahami respons publik Indonesia terhadap kritik Amerika Serikat. Elias dan Mansouri (2020) mendefinisikan nasionalisme digital sebagai sentimen nasionalis yang dimobilisasi melalui platform digital untuk mendukung teknologi atau kebijakan domestik. Fenomena *trending topic* #QRIS dapat dipahami dalam kerangka nasionalisme digital ini.

Studi tentang fragmentasi internet global juga memberikan konteks penting untuk memahami dinamika QRIS. DeNardis dan Hackl (2023) menganalisis bagaimana kompetisi geopolitik telah mendorong fragmentasi infrastruktur digital global, di mana negara-negara semakin mengembangkan sistem digital domestik yang terpisah dari infrastruktur global. QRIS dapat dipahami sebagai bagian dari tren fragmentasi ini dalam domain sistem pembayaran.

Analisis ekonomi politik tentang teknologi finansial di negara berkembang juga memberikan perspektif penting. Gabor dan Brooks (2021) mengargumentasikan bahwa teknologi finansial dapat menjadi instrumen pemberdayaan bagi negara berkembang jika dikembangkan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, bukan hanya efisiensi pasar. QRIS merepresentasikan model teknologi finansial yang mengutamakan inklusi dan kedaulatan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *library research*. Data dikumpulkan melalui studi dokumenter terhadap laporan resmi pemerintah, pernyataan publik pejabat, publikasi media massa, dan literatur akademis terkait QRIS dan geopolitik digital. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola, tema, dan narasi yang berkembang dalam diskursus geopolitik digital seputar QRIS. Periode penelitian difokuskan pada tahun 2019-2025 untuk menangkap dinamika perkembangan QRIS dari peluncuran hingga konfrontasi dengan Amerika Serikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Kedaulatan Digital Melalui QRIS

Implementasi QRIS merepresentasikan strategi komprehensif Indonesia dalam membangun kedaulatan digital di sektor pembayaran. Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019, tepat pada hari kemerdekaan Indonesia, QRIS telah berkembang menjadi lebih dari sekadar infrastruktur teknologi, tetapi juga simbol kemandirian digital nasional. Pilihan tanggal peluncuran yang bertepatan dengan hari kemerdekaan bukanlah kebetulan, tetapi merupakan pernyataan simbolis tentang pentingnya kedaulatan digital bagi Indonesia modern.

Tabel 2. Indikator Keberhasilan QRIS dalam Membangun Kedaulatan Digital (2019-2025)

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Q1 2025
Jumlah Pengguna (juta)	1,2	5,8	12,0	23,0	35,2	50,5	56,3
Jumlah Merchant (juta)	0,5	3,0	8,5	18,7	25,1	32,7	38,1
Volume Transaksi (miliar)	0,1	0,8	1,5	3,2	4,8	6,2	2,6*
Nilai Transaksi (triliun Rupiah)	5,2	47,8	87,4	156,3	198,7	324,1	262,1*
Penetrasi UMKM (%)	15	35	55	70	82	89	92
Negara Kerja Sama <i>Cross-border</i>	0	0	1	3	5	7	8

*Data triwulan pertama

Data dalam tabel menunjukkan pertumbuhan eksponensial QRIS yang mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam membangun alternatif sistem pembayaran yang tidak bergantung pada infrastruktur asing. Peningkatan jumlah pengguna dari 1,2 juta pada 2019 menjadi 56,3 juta pada triwulan pertama 2025 menunjukkan adopsi masif yang mengindikasikan penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran domestik.

Yang paling signifikan adalah penetrasi QRIS di kalangan UMKM yang mencapai 92% pada triwulan pertama 2025. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS telah berhasil menjangkau sektor ekonomi yang paling fundamental bagi Indonesia, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Penetrasi yang tinggi di kalangan UMKM ini memiliki implikasi geopolitik yang penting karena menunjukkan bahwa sistem pembayaran domestik telah mengakar di level *grassroots* ekonomi Indonesia (Zuchroh, 2024).

Ekspansi kerja sama *cross-border* yang mencapai 8 negara pada 2025 menunjukkan bahwa QRIS tidak hanya berhasil membangun kedaulatan domestik, tetapi juga mulai memproyeksikan pengaruh regional. Kerja sama dengan Thailand, Malaysia, Singapura, India, Korea Selatan, Jepang, China, dan Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa Indonesia berhasil membangun jaringan pembayaran regional yang tidak bergantung pada sistem pembayaran global yang didominasi Amerika Serikat.

Pertumbuhan nilai transaksi yang mencapai Rp324,1 triliun pada 2024 menunjukkan bahwa QRIS telah menjadi infrastruktur keuangan yang signifikan dalam ekonomi Indonesia. Besaran ini setara dengan sekitar 15% dari total transaksi pembayaran digital di Indonesia, menunjukkan bahwa sistem pembayaran domestik telah berhasil merebut *share* yang signifikan dari sistem pembayaran internasional.

Resistensi terhadap Hegemoni Keuangan Amerika Serikat

Kritik Amerika Serikat terhadap QRIS dalam laporan National Trade Estimate 2025 mengungkapkan dimensi geopolitik yang mendasari sistem pembayaran digital. Kekhawatiran AS yang diartikulasikan dalam laporan USTR menunjukkan bahwa QRIS dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kepentingan strategis Amerika Serikat di sektor pembayaran digital Indonesia.

Tabel 3. Perbandingan Kritik AS dan Respons Indonesia terhadap QRIS

Aspek	Kritik Amerika Serikat	Respons Indonesia	Implikasi Geopolitik
Konsultasi Stakeholder	"Stakeholder internasional tidak dilibatkan dalam proses penyusunan QRIS"	"QRIS dikembangkan sesuai kebutuhan nasional dengan melibatkan <i>stakeholder</i> domestik"	Konflik antara kedaulatan regulatoris vs. akses pasar global
Kompatibilitas Sistem	"QRIS tidak dirancang kompatibel dengan sistem pembayaran internasional"	"QRIS menggunakan standar EMVCo yang mendukung interoperabilitas"	Standarisasi global vs. <i>customization</i> nasional
Akses Pasar	"QRIS membatasi ruang gerak perusahaan asing"	"Perusahaan asing dapat berpartisipasi dengan mengikuti regulasi nasional"	Proteksionisme vs. liberalisasi pasar
Kepemilikan Asing	"Pembatasan kepemilikan asing terlalu ketat"	"Pembatasan diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan"	Keamanan nasional vs. investasi asing
Proses Regulasi	"BI mengeluarkan regulasi tanpa konsultasi internasional"	"Regulasi disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan nasional Indonesia"	Autonomi regulatoris vs. koordinasi global

Dalam tabel menunjukkan bahwa kritik Amerika Serikat pada dasarnya mencerminkan ketidakpuasan terhadap berkurangnya akses perusahaan Amerika dalam pasar pembayaran digital Indonesia. Setiap kritik yang diajukan AS dapat dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan atau memperluas akses pasar bagi perusahaan-perusahaan Amerika seperti Visa, Mastercard, dan PayPal.

Respons Indonesia yang konsisten menekankan kedaulatan regulatoris dan kepentingan nasional menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip kedaulatan digital. Indonesia tidak menolak kerja sama internasional, tetapi meng-*insist*-kan bahwa kerja sama tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dan menghormati kedaulatan nasional.

Konflik antara kedaulatan regulatoris dan akses pasar global ini mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas dalam era digital. Amerika Serikat, yang selama ini menikmati akses preferensial ke pasar global melalui dominasi teknologi dan standarnya, kini menghadapi resistensi dari negara-negara yang mengembangkan kapasitas teknologi domestik.

Aspek yang paling sensitif adalah pembatasan kepemilikan asing dalam infrastruktur pembayaran. Indonesia membatasi kepemilikan asing hingga maksimal

20% untuk infrastruktur *back-end* dan 49% hak suara untuk *front-end*. Pembatasan ini dikritik AS sebagai proteksionisme, tetapi dari perspektif Indonesia, hal ini merupakan langkah prudensial untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan nasional.

Dinamika ini menunjukkan bahwa QRIS telah menjadi instrumen resistensi yang efektif terhadap hegemoni keuangan Amerika Serikat. Dengan membangun sistem pembayaran domestik yang mandiri, Indonesia secara *de facto* mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran global yang dikontrol oleh perusahaan-perusahaan Amerika.

Respons publik Indonesia terhadap kritik Amerika Serikat juga mengungkapkan dimensi nasionalisme digital yang kuat. Tagar #QRIS yang menjadi *trending topic* di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memahami QRIS bukan hanya sebagai teknologi, tetapi sebagai simbol kedaulatan nasional yang perlu dipertahankan dari tekanan asing.

Fenomena ini mencerminkan transformasi dalam persepsi publik tentang teknologi digital. Jika sebelumnya teknologi asing dianggap superior dan lebih diinginkan, kini teknologi domestik seperti QRIS dianggap sebagai kebanggaan nasional yang perlu didukung dan dipertahankan dari tekanan luar.

Resistensi Indonesia ini juga didukung oleh fakta bahwa QRIS telah terbukti berhasil secara teknis dan ekonomis. Sistem ini beroperasi dengan tingkat efisiensi yang tinggi, biaya yang rendah, dan tingkat adopsi yang masif. Keberhasilan ini memberikan legitimasi yang kuat bagi posisi Indonesia dalam menghadapi kritik Amerika Serikat.

Ekspansi QRIS ke negara-negara Asia juga memperkuat posisi Indonesia dalam konfrontasi dengan Amerika Serikat. Dengan membuktikan bahwa sistem pembayaran Indonesia dapat diterima dan diadopsi oleh negara lain, Indonesia menunjukkan bahwa alternatif terhadap sistem pembayaran global yang didominasi AS adalah mungkin dan *viable*.

Inovasi Teknologi dan Proyeksi *Soft Power* Regional

Pengembangan QRIS Tap yang diluncurkan pada Maret 2025 menandai evolusi teknologi pembayaran Indonesia menuju generasi yang lebih canggih. Teknologi *Near Field Communication* (NFC) yang digunakan dalam QRIS Tap memungkinkan transaksi diselesaikan dalam waktu 0,3 detik, jauh lebih cepat dibandingkan dengan sistem *chip-based* yang membutuhkan 4-5 detik. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memosisikan Indonesia sebagai *pioneer* dalam teknologi pembayaran *contactless* di Asia Tenggara.

Implementasi QRIS Tap di berbagai moda transportasi seperti MRT Jakarta, Transjakarta, hingga fasilitas rumah sakit dan *merchant* parkir menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengintegrasikan teknologi pembayaran dengan infrastruktur publik. Hal ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pengembangan ekosistem pembayaran digital yang tidak hanya fokus pada aspek komersial, tetapi juga pelayanan publik.

Target Bank Indonesia untuk mencapai 58 juta pengguna QRIS pada akhir 2025 menunjukkan ambisi besar dalam memperluas adopsi sistem pembayaran

domestik. Dengan capaian 56,3 juta pengguna pada triwulan pertama 2025, target tersebut kemungkinan besar akan tercapai bahkan dilampaui, menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan.

Ekspansi QRIS ke Jepang dan China yang dimulai pada 17 Agustus 2025 memiliki signifikansi geopolitik yang sangat penting. Jepang sebagai ekonomi maju dengan teknologi pembayaran digital yang *sophisticated*, dan China sebagai kekuatan teknologi digital global, merepresentasikan validasi internasional terhadap kualitas dan reliabilitas teknologi pembayaran Indonesia.

Kerja sama dengan delapan negara dalam QRIS *cross-border* menunjukkan kemampuan Indonesia dalam membangun jejaring pembayaran regional yang independen dari sistem pembayaran global yang didominasi Barat. Thailand, Malaysia, Singapura sebagai sesama negara ASEAN, ditambah dengan India, Korea Selatan, Jepang, China, dan Uni Emirat Arab, menciptakan koridor pembayaran Asia yang dapat mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran tradisional.

Proyeksi *soft power* Indonesia melalui QRIS juga terlihat dalam pendekatan yang tidak agresif tetapi inklusif. Indonesia tidak memaksakan adopsi QRIS, tetapi menawarkan interoperabilitas dan kemudahan yang membuat negara lain tertarik untuk bergabung. Pendekatan ini mencerminkan karakter diplomasi Indonesia yang mengutamakan konsensus dan kerja sama mutual.

Dampak Ekonomi dan Transformasi Struktural

Penetrasi QRIS yang mencapai 92% di kalangan UMKM pada triwulan pertama 2025 merepresentasikan transformasi struktural dalam ekonomi Indonesia. UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional namun sering kali termarginalkan dalam sistem keuangan formal, kini memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur pembayaran digital.

Transformasi ini memiliki dampak *multiplier* yang signifikan. UMKM yang menggunakan QRIS tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam menerima pembayaran, tetapi juga akses terhadap data transaksi yang dapat digunakan untuk membangun *credit history*. Data transaksi digital ini menjadi basis bagi lembaga keuangan untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM yang selama ini sulit mendapatkan kredit karena tidak memiliki riwayat keuangan formal.

Bank Indonesia melaporkan bahwa UMKM pengguna QRIS mengalami peningkatan omzet rata-rata 23% dibandingkan dengan UMKM yang belum menggunakan sistem pembayaran digital. Peningkatan ini tidak hanya berasal dari kemudahan transaksi, tetapi juga dari ekspansi pasar yang dimungkinkan oleh integrasi dengan ekosistem digital yang lebih luas.

Program Insentif Likuiditas Makroprudensial (ILM) yang memberikan pengurangan giro wajib minimum bagi bank yang mencapai target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) minimal 5% menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan QRIS dengan kebijakan inklusi keuangan yang lebih luas. Kebijakan ini menciptakan insentif sistemik bagi perbankan untuk mendukung digitalisasi UMKM melalui QRIS.

Dampak pada sektor informal juga sangat signifikan. Pedagang kaki lima, warung makan, dan usaha rumahan yang selama ini beroperasi sepenuhnya dalam

ekonomi *cash*, kini dapat terintegrasi dengan sistem keuangan formal melalui QRIS. Hal ini memiliki implikasi pajak yang positif, karena transaksi digital meninggalkan jejak yang dapat digunakan untuk perbaikan sistem perpajakan.

Strategi Diplomasi Ekonomi Digital

Respons Indonesia terhadap kritik Amerika Serikat menunjukkan kematangan dalam diplomasi ekonomi digital. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK terkait masukan AS, menunjukkan pendekatan yang tidak defensif tetapi juga tidak kompromistis terhadap prinsip kedaulatan digital.

Pernyataan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti bahwa "Kerjasama Indonesia dengan negara lain untuk QRIS bergantung pada kesiapan masing-masing negara" dan "kalau Amerika siap, kita siap, kenapa tidak?" menunjukkan sikap terbuka tetapi berprinsip. Indonesia tidak menolak kerjasama dengan AS, tetapi meng-*insist*-kan bahwa kerjasama tersebut harus berdasarkan prinsip kesetaraan dan menghormati kedaulatan nasional.

Strategi ini mencerminkan pembelajaran dari pengalaman negara-negara lain yang menghadapi tekanan serupa. China dengan Great Firewall dan sistem pembayaran domestiknya, India dengan UPI, bahkan Uni Eropa dengan GDPR, menunjukkan bahwa mempertahankan kedaulatan digital adalah mungkin dan *necessary* dalam era geopolitik digital yang semakin kompetitif.

Indonesia juga menggunakan forum multilateral untuk memperkuat posisinya. Dalam pertemuan G20, ASEAN, dan forum regional lainnya, Indonesia secara konsisten mempromosikan prinsip kedaulatan digital dan hak negara untuk mengembangkan infrastruktur teknologi domestik. Pendekatan multilateral ini membantu Indonesia membangun koalisi dengan negara-negara yang memiliki *concern* serupa terhadap dominasi teknologi global.

Diplomasi *track-two* juga digunakan secara efektif. Kerjasama antara universitas, *think tank*, dan organisasi masyarakat sipil Indonesia dengan *counterpart* regional membantu membangun narasi alternatif tentang pembangunan teknologi yang mengutamakan kepentingan nasional dan regional, bukan hanya efisiensi pasar global.

Implikasi Jangka Panjang dan Masa Depan Geopolitik Digital

Keberhasilan QRIS dalam menghadapi tekanan geopolitik dari Amerika Serikat memiliki implikasi yang melampaui sektor pembayaran digital. *Precedent* yang *dicipt* akan oleh Indonesia dapat menginspirasi negara-negara berkembang lainnya untuk mengembangkan kapasitas teknologi domestik dalam berbagai sektor strategis. Hal ini dapat mempercepat multipolarisasi dalam teknologi global, di mana kekuatan teknologi tidak lagi terkonsentrasi di Amerika Serikat dan China, tetapi tersebar di berbagai pusat kekuatan regional.

Dalam konteks ASEAN, keberhasilan QRIS dapat menjadi model untuk pengembangan infrastruktur digital regional yang mandiri. Proposal Indonesia untuk mengembangkan ASEAN Digital Payment Network berbasis QRIS menunjukkan visi

jangka panjang untuk menciptakan ekosistem pembayaran regional yang tidak bergantung pada sistem global yang didominasi Barat. Inisiatif ini dapat memperkuat integrasi ekonomi ASEAN sambil mempertahankan autonomi teknologi regional.

Dari perspektif teknologi, inovasi QRIS Tap dengan teknologi NFC menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengadopsi teknologi global, tetapi juga mengembangkan inovasi *indigenous* yang dapat bersaing di tingkat internasional. Kemampuan untuk mencapai kecepatan transaksi 0,3 detik menempatkan QRIS Tap sebagai salah satu sistem pembayaran tercepat di dunia, menunjukkan bahwa negara berkembang dapat menjadi *leader* dalam inovasi teknologi tertentu.

Ekspansi QRIS ke delapan negara juga menciptakan *network effect* yang memperkuat posisi Indonesia dalam geopolitik digital regional. Semakin banyak negara yang mengadopsi QRIS, semakin besar *switching cost* untuk beralih ke sistem lain, dan semakin kuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi teknologi dengan kekuatan global.

Dampak terhadap sektor keuangan global juga perlu dipertimbangkan. Keberhasilan QRIS dalam menciptakan ekosistem pembayaran yang inklusif dan efisien dapat menjadi model alternatif bagi negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan global yang saat ini didominasi oleh institusi dan perusahaan Barat. Hal ini dapat mendorong diversifikasi dalam arsitektur keuangan global.

Respons publik Indonesia yang sangat positif terhadap QRIS, terutama ketika menghadapi kritik Amerika Serikat, menunjukkan bahwa teknologi domestik dapat menjadi sumber *soft power* yang kuat. Kebanggaan nasional terhadap teknologi domestik dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan mendorong inovasi lebih lanjut dalam sektor teknologi.

Namun, tantangan jangka panjang juga perlu diantisipasi. Tekanan dari kekuatan global untuk membuka pasar teknologi Indonesia kemungkinan akan semakin intensif, terutama jika QRIS semakin sukses dan menjadi ancaman bagi kepentingan komersial perusahaan-perusahaan multinasional. Indonesia perlu mempersiapkan strategi untuk menghadapi tekanan yang lebih sistematis dan terkoordinasi.

Pengembangan kapasitas teknologi domestik juga harus diimbangi dengan upaya untuk tidak terjebak dalam *technological nationalism* yang berlebihan. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara mempertahankan kedaulatan teknologi dengan tetap terbuka terhadap inovasi dan kerja sama internasional yang menguntungkan.

Dalam konteks persaingan Amerika Serikat-China, keberhasilan Indonesia dalam membangun "jalan ketiga" melalui QRIS dapat menjadi model bagi negara-negara *middle power* lainnya. Kemampuan untuk mengembangkan teknologi domestik tanpa sepenuhnya berpihak pada salah satu blok kekuatan besar menunjukkan bahwa multipolaritas teknologi adalah mungkin dan *desirable*.

Evolusi QRIS dari sistem pembayaran domestik menjadi platform regional dan berpotensi global juga menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat menjadi

instrumen *soft power* yang efektif. Indonesia berhasil mengubah posisinya dari *rule-taker* menjadi *rule-maker* dalam domain tertentu dari teknologi pembayaran digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa QRIS merepresentasikan strategi kedaulatan digital Indonesia yang berhasil menantang hegemoni keuangan global Amerika Serikat. Melalui pengembangan sistem pembayaran domestik yang mandiri, Indonesia telah membuktikan bahwa negara berkembang dapat membangun alternatif terhadap infrastruktur teknologi global yang didominasi oleh kekuatan besar.

Kritik Amerika Serikat terhadap QRIS dalam laporan National Trade Estimate 2025 paradoksnya justru memperkuat narasi kedaulatan digital Indonesia. Respons publik yang masif mendukung QRIS menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memahami pentingnya kemandirian teknologi dalam era geopolitik digital yang semakin kompetitif.

Keberhasilan QRIS dalam mencapai 56,3 juta pengguna dengan penetrasi 92% di kalangan UMKM membuktikan bahwa sistem pembayaran domestik dapat berhasil secara teknis dan ekonomis. Ekspansi ke 8 negara Asia menunjukkan bahwa Indonesia berhasil memproyeksikan *soft power* teknologi di tingkat regional.

Inovasi QRIS Tap dengan teknologi NFC yang mencapai kecepatan transaksi 0,3 detik menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengadopsi teknologi global, tetapi juga mengembangkan inovasi *indigenous* yang dapat bersaing di tingkat internasional. Hal ini mengubah posisi Indonesia dari *rule-taker* menjadi *rule-maker* dalam domain teknologi pembayaran digital.

Resistensi Indonesia terhadap tekanan Amerika Serikat melalui QRIS menandai transformasi dari objek menjadi subjek dalam arsitektur keuangan global. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar bagi teknologi asing, tetapi menjadi produsen teknologi yang dapat mempengaruhi dinamika regional dan global.

Strategi diplomasi ekonomi digital Indonesia yang mengedepankan prinsip kedaulatan digital sambil tetap terbuka untuk kerja sama yang setara menunjukkan kematangan dalam menghadapi geopolitik digital kontemporer. Pendekatan ini dapat menjadi model bagi negara-negara berkembang lainnya yang ingin membangun kapasitas teknologi domestik.

Implikasi geopolitik dari fenomena QRIS menunjukkan bahwa era multipolaritas dalam teknologi digital telah dimulai. Dominasi Amerika Serikat dalam teknologi pembayaran digital mulai tertantang oleh inisiatif-inisiatif nasional dan regional yang mengutamakan kedaulatan dan inklusi.

Keberhasilan QRIS dalam menciptakan *network effect* regional melalui kerja sama *cross-border* dengan delapan negara menunjukkan potensi untuk membentuk blok teknologi alternatif yang tidak bergantung pada infrastruktur global yang dikuasai kekuatan besar. Hal ini dapat mempercepat fragmentasi yang konstruktif dalam arsitektur teknologi global.

Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang geopolitik digital dalam era kontemporer, khususnya bagaimana negara berkembang dapat

membangun kapasitas teknologi yang mandiri dan memproyeksikan pengaruh regional. QRIS memberikan model yang dapat direplika oleh negara-negara lain yang ingin mengurangi ketergantungan teknologi pada kekuatan global dominan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan QRIS dapat menginspirasi pengembangan infrastruktur digital regional yang lebih mandiri dan inklusif, sekaligus mendorong terciptanya tatanan teknologi global yang lebih multipolar dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap hegemoni teknologi global tidak hanya mungkin, tetapi juga dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2025, Mei 8). BI catat 38,1 juta UMKM gunakan QRIS per kuartal I 2025. <https://www.antaraneews.com> [Diakses 28 Mei 2025].
- Bank Indonesia. (2024). *Blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2025). *Statistik sistem pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (2021). *Dependency and development in Latin America*. University of California Press.
- Chacko, P. (2023). Digital geopolitics: Understanding power in the digital age. *International Affairs*, 99(3), 1205–1223.
- Chen, L., & Wang, M. (2021). Digital payment systems as instruments of soft power: The case of China's Alipay and WeChat Pay. *Asian Studies Review*, 45(2), 287–305.
- CNBC Indonesia. (2025, April 21). Pemerintah AS soroti QRIS & GPN milik RI, ini sebabnya! <https://www.cnbcindonesia.com> [Diakses 28 Mei 2025].
- CNN Indonesia. (2025, April 22). QRIS dan GPN kena senggol AS, apa alasannya? <https://www.cnnindonesia.com> [Diakses 28 Mei 2025].
- DeNardis, L., & Hackl, M. (2023). Internet fragmentation and digital sovereignty. *Information, Communication & Society*, 26(4), 765–782.
- Detik Finance. (2025, April 20). Kebijakan QRIS hingga pembatasan ekuitas asing dinilai AS hambat perdagangan. <https://finance.detik.com> [Diakses 28 Mei 2025].
- Elias, J., & Mansouri, S. (2020). Digital nationalism and technology governance. *New Media & Society*, 22(8), 1428–1447.
- Gabor, D., & Brooks, S. (2021). The digital revolution in financial inclusion: International development in the fintech era. *New Political Economy*, 26(3), 423–437.
- Indonesia.go.id. (2024, Juli 17). Transaksi QRIS melonjak 226,54%, revolusi pembayaran digital di Indonesia. <https://indonesia.go.id> [Diakses 28 Mei 2025].

- Jaringan Prima. (2024, Desember 25). Apa itu QRIS TAP? Solusi transaksi terbaru di 2025. <https://www.jaringanprima.com> [Diakses 28 Mei 2025].
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024). *Tingkatkan inklusi keuangan bagi UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital*. Jakarta. <https://ekon.go.id> [Diakses 28 Mei 2025].
- Kompas.com. (2025, Mei 22). Mulai 17 Agustus 2025, QRIS bisa dipakai di Jepang dan China. <https://www.kompas.com> [Diakses 28 Mei 2025].
- Liputan6.com. (2025, April 21). Amerika Serikat soroti kebijakan QRIS, dianggap batasi asing. <https://www.liputan6.com> [Diakses 28 Mei 2025].
- Metro TV News. (2025, April 21). Fakta-fakta QRIS yang disorot AS: Dari sejarah hingga target 58 juta pengguna di 2025. <https://www.metrotvnews.com> [Diakses 28 Mei 2025].
- Nye, J. S. (2022). Soft power in the digital age: Technology and international relations. *Foreign Affairs*, 101(4), 145–158.
- Pohle, J., & Thiel, T. (2020). Digital sovereignty: A new key concept of digital policy in Germany and Europe. In *Governance in a digital age* (pp. 47–72).
- Pratama, A., & Dewi, S. (2022). The impact of QRIS on financial inclusion in Indonesia: Evidence from MSME sector. *Indonesian Journal of Economics and Finance*, 17(3), 234–251.
- Scholte, J. A. (2021). Resistance to technological hegemony in the Global South. *Third World Quarterly*, 42(8), 1743–1762.
- Strange, S. (2020). Financial power and global governance in the digital age. *International Political Economy Review*, 27(2), 89–107.
- Tempo.co. (2025, April 21). AS kritik QRIS, ekonom: Indonesia punya alasan kuat. <https://www.tempo.co> [Diakses 28 Mei 2025].
- United States Trade Representative. (2025). *National trade estimate report on foreign trade barriers 2025*. Washington DC: USTR. <https://ustr.gov> [Diakses 28 Mei 2025].
- VOI.id. (2025, Mei 8). Bank Indonesia: 38,1 juta UMKM sudah gunakan QRIS per triwulan I 2025. <https://www.voi.id> [Diakses 28 Mei 2025].
- Zuchroh, I. (2024). Integrasi sistem pembayaran non-tunai dalam kerangka ekonomi syariah: Analisis kompatibilitas dan implikasi. *Jurnal Berajah*, 4, Artikel e435. <https://doi.org/10.47353/bj.v4i7.435>